

SKRIPSI

**PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR**

NUR FIRMAN CHAER

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100518



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

*Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan*

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR FIRMAN CHAER
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100518

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota
di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Nur Firman Chaer

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100518

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0283/FSP/ A.4-II/VII/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024.

Mengetahui

Ketua	Sekertaris
 <u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM. 730727	 <u>Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u> NBM. 992797
Tim Penguji	

1.	Dr.Nuryanti Mustari,S.IP.,M.Si	()
2.	Dr.Nurwahid,S.Sos.,M.Si	()
3.	Hardianto Hawing,ST.,MA	()
4.	Nursaleh Hartaman,S.IP.,M.IP	()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

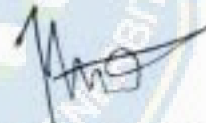
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Firman Chaer
Nomor Stambuk : 105641100518
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Maret 2024

Yang Menyatakan



Nur Firman Chaer

ABSTRAK

Nur Firman Chaer, Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar (dibimbing oleh Hamrun dan Hardianto Hawing)

Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat / masyarakat untuk memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Dimana para elite politik lokal dan partai melakukan polarisasi pendukungnya dalam menentukan pilihan seorang calon kepala daerah dan berbagai cara. Sehingga menimbulkan perilaku politik pemilih yang tidak murni dari hati nuraninya tetapi dipaksakan agar memilih sesuai dengan kehendak pimpinannya dengan imbalan tertentu. Pemilihan Kepala daerah sebagai kegiatan politik lokal dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2011 yang kemudian direvisi dengan UU No.07/ tahun 2017 tentang pemilu yang di dalamnya mengatur tentang pengaturan pemilihan kepala daerah yang didalamnya tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, serta dalam pemberhentian kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana fokus penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku calon walikota yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang

mendalam tentang ucapan, perilaku, yang dapat diamati dari para calon walikota. Tehnik pengambilan data penelitian ini dengan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*) melalui *snowball* pada pemilih yang ada di daftar pemilih tetap. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan kajian teori antara lain, teori pertukaran Sosial, teori Perilaku Sosial dan teori tindakan Sosial. Teori-teori tersebut sangat relevan dengan permasalahan yang menjadi kajian karena menyangkut tentang perilaku sosial, tindakan sosial manusia dan pertukaran sosial yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Makassar.

Kata kunci: Pilkada, Perilaku Politik, Preferensi Politik, Calon Walikota, Modal Sosial, Modal Ekonomi

ABSTRACT

Nur Firman Chaer, *Community Political Preferences in Mayor Elections in Tamalabba Village, Ujung Tanah District, Makassar City (supervised by Hamrun and Hardianto Hawing)*

Social facts show that the local democratic process which should run well and correctly in accordance with its aim, namely to increase the political participation of the people/society in choosing their leaders, has not yet produced maximum results. Where local political elites and parties polarize their supporters in determining the choice of a regional head candidate and in various ways. This gives rise to voters' political behavior that is not pure from their conscience but is forced to vote according to the wishes of their leaders with certain rewards. Election of regional heads as a local political activity is carried out based on Law No. 2 of 2011 which was later revised with Law No. 07/2017 concerning elections which regulates the regulation of regional head elections which includes election, ratification, appointment, as well as dismissal of regional heads. This research uses qualitative research methods, where the research focus uses a case study approach. This research, with a qualitative approach, is one of the research procedures that produces descriptive data in the form of observed speech or writing and behavior of mayoral candidates. The qualitative approach is expected to produce in-depth descriptions of the words and behavior that can be observed from the mayoral candidates. The data collection technique for this research is an in-depth interview technique via snowballing with voters on the permanent voter list. To support the implementation of research, researchers used theoretical studies, including Social Exchange Theory, Social Behavior Theory and Social Action Theory. These theories are very relevant to the problem being studied because they relate to social behavior, human social actions and social exchanges that occur in regional head elections (Pilkada) in Makassar City.

Keywords: *Regional Election, Political Behavior, Political Preferences, Mayor Candidates, Social Capital, Economic Capital*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya. Semoga ayahanda Sarding dan ibunda Jusmin senantiasa di Rahmati oleh Allah SWT. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan penuh hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamrun, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, ST.,MA selaku Pembimbing II penulis, yang penuh kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintah Universitas Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Kedua Orang Tuaku, yang telah mendukung selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak membantu, memberikan solusi, serta berbagi ilmunya kepada penulis.
6. Para pihak Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Karya Skripsi penulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2024
Penulis,

NUR FIRMAN CHAER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	12
1. Konsep Preferensi Politik	12
2. Konsep Partisipasi dan Pendidikan Politik.....	15
3. Konsep Pendidikan Politik	26
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Fokus Penelitian	29
E. Deskripsi Fokus penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	39
1. Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar	36
2. Pendekatan Sosiologis	40
3. Pendekatan Psikologis	45
4. Pendekatan Rasional.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Preferensi politik merupakan suatu kebutuhan yang hakiki bagi setiap manusia dalam menentukan pilihan. Melalui pendidikan, manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan, intelektualitas, integritas, serta moral yang baik. Nilai plus pendidikan tersebut, akan mengantarkan manusia menjadi berkualitas, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang makin kompetitif. Menyadari sedemikian pentingnya pendidikan, pemerintah Kabinet Indonesia Maju menempatkan pendidikan sebagai salah satu program prioritas yang harus digalakkan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan generasi yang lebih cerdas.

Preferensi dan pendidikan sangatlah penting, dan itu juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 31 yang mengatakan bahwa partai politik melakukan pendidikan bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, meningkatkan preferensi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan tidak saja mencerminkan sejauh mana proses transformasi sosial telah berhasil dalam sebuah negara, melainkan juga menunjukkan

baik buruk tampak penguasa. Seharusnya, tingkat partisipasi dan preferensi politik masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang berpendidikan lebih banyak pengetahuannya mengenai apa itu partisipasi dan preferensi dari pada yang tidak berpendidikan, dan ini terjadi di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah. Seperti data yang telah di peroleh bahwasannya masyarakat yang berpendidikan tingkat partisipasinya sebesar 40% dan yang tidak berpendidikan tingkat partisipasinya 60%. Timbul pertanyaan besar mengapa masyarakat yang berpendidikan tidak menyebabkan tingkat partisipasi memilih dan preferensi politik masyarakat meningkat.

Sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berlaku di Indonesia, dimana yang berdasarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mempunyai kebebasan berpendapat, persamaan di muka umum, dan mempunyai hak salah satunya yaitu hak dipilih dan memilih. Seiring dengan berkembangnya pemilu di Indonesia, tingkat kesadaran politik masyarakat juga ikut berkembang.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap partai yang memiliki pengaruh terhadap pilihan politik. Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang.

Dalam salah satu jurnal penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan

sekitar individu mempengaruhi apa yang dipercaya dan apa yang akan dilakukan dalam kaitan dengan politik, khususnya preferensidan perilaku politik. Prinsip ini diambil dari sebuah pandangan mendasar tentang persepsi, kognisi, dan aksi: bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Saat individu berinteraksi dan mengantisipasi interaksi, masing-masing individu mempengaruhi apa yang akan dipikirkan, dinilai, dan dilakukan individu lainnya (Prasetya, 2018). Preferensi politik masyarakat sangat ditentukan oleh unsur- unsur pilihan baik yang rasional, tampak tidak rasional, detail penampilan, dan bahkan nada suara yang tampaknya remeh.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.⁵ Bony juga mengatakan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Kekuatan kontekstual yang meliputi persaingan elit, kemampuan bermusyawarah, mengemukakan pendapat dan mengkomunikasikan keahlian individu dalam suatu bidang ditampilkan sebagai atribut politisi untuk

menarik keputusan pemilih dan juga preferensi politik masyarakat. Studi perilaku memilih memiliki sejarah panjang.

Sejarahnya berkaitan dengan keberhasilan gerakan demokrasi pada abad ke-19. Menyebarnya demokrasi juga berarti menyebarnya pemilu ke berbagai negara. Salah satu parameter pemilu yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural seiring dengan semakin kompleksnya pemilu.

Pemilih adalah pendukung utama yang sangat penting dalam proses pemilu yang demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap pemilih dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut voting behavior atau perilaku pemilih.

Dalam kategori politik kaum remaja dimasukkan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain.

Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Pemilih yang di dalamnya pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan objek mobilisasi.

Dari data yang dirilis KPU, jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30% nya adalah Pemilih Pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula (KPU RI, 2015).

Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik (Wibowo, 2020). Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan

partai- partai politik.

Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula dan masyarakat sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi partai. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah.

B. Rumusan Masalah

Preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan di pengaruhi beberapa hal yang kemudian menjadi kajian penulis yang dibangun dalam rumusan masalah yaitu bagaimana Preferensi Politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota makassar ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada ajang kontestasi pemilu mendatang.
 - b. Memberikan masukan terhadap preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada ajang pemilu yang akan datang.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan preferensi politik pemilih masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap preferensi politik masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Dian Ekawaty (2021)	Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan preferensi politik kalangan pemilih pemula nampaknya mendapat pengaruh besar dari kehadiran media sosial yang massif dewasa ini. Memang sebagai pemilih pemula dengan status sebagai pelajar pada sekolah menengah atas, pemahaman awal terkait dengan politik dalam hal hak dan kewajiban warga negara banyak

			<p>dipengaruhi oleh proses Pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Namun hal tersebut nampaknya hanyamenjadi titik awal pengenalan pada ruang politik saja. Hal ini karena pelajaran yang diterima belum secara mendalam memberikan informasi dan gambaran tentang ruang politik terutama dalam konteks praktis. Hal ini menjadikan upaya untuk membentuk preferensi politiknya membutuhkan upaya dan informasi-informasi lainnya.</p>
2.	<p>Loina Lalolo dan Munawaroh Zainal (2018)</p>	<p>Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan media sosial telah digunakan secara massif oleh para pemilih pemula karena melalui media sosial mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi tanpa memerlukan persiapan fisik maupun keharusan</p>

		<p>untuk memperlihatkan atribut kepribadian secara terbuka. Jaringan Internet dapat diakses dengan mudah, baik di kampus maupun di rumah, sehingga intensitas menggunakan media sosial menjadi sangat tinggi.</p> <p>Didalam berjejaring, interaksi dan komunikasi hanya dilakukan dengan orang-orang yang telah dikenal sebelumnya sehingga berjejaring tidak bertujuan untuk membuat jaringan baru, tetapi memperkuat jejaring lama dalam dunia nyata.</p> <p>Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan mengenai partisipasi politik pemilih pemula di media sosial dengan harapan bisa memotivasi agar pengguna media social juga berusaha untuk bisa melekat politik.</p>
--	--	---

3.	Rizky Mauliza (2014)	<p>Preferensi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Pada Mahasiswa Tingkat I Jurusan Ilmu Politik Fisip Usu)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini harapannya agar para pemilih pemula tetap dapat mempertahankan partisipasi politiknya yang memang tergolong memegang peran yang besar dengan presentase pada pemilu 2014 sebanyak 30% lebih yang telah terdaftar di KPU, sehingga ketika kuota hak pemilih pemula ini dapat dijalankan dengan terus berpartisipasi pada pentas demokrasi maka ini akan dapat membawa era demokrasi Indonesia pada tahap yang lebih baik nantinya, tentunya hal itu akan lebih baik pula ketika pemilih pemula dapat memilih dengan cerdas berdasarkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan serta didukung dengan etika yang baik pula berdasarkan hati nurani dan integritas tanpa adanya hal-hal negatif dari pihak-pihak yang bermain dengan rasa kecurangan.</p>
----	----------------------	--	--

Pada tabel 2.1 merupakan rujukan penelitian terdahulu dengan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan penulis. Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pemilih pemula. Sementara perbedaan terletak pada lokus penelitian serta indikator yang digunakan dalam melakukan penelitian.

B. Teori Dan Konsep

1. Konsep Preferensi Politik

Preferensi itu diambil dari kata prefer, artinya yang paling disukai atau dapat juga disebut ketetapan individu dalam memutuskan pilihan terhadap suatu obyek. Preferensi secara umum, bisa diartikan sebagai suatu pilihan seseorang apakah suka atau tidak terhadap suatu produk barang atau jasa. Preferensi sebagai suatu kesukaan seseorang atas berbagai jenis produk atau jasa (Prasetya, 2018).

Preferensi adalah pilihan, kesukaan, kecenderungan atau hal yang didahulukan, diprioritaskan dan diutamakan dari pada yang lain. jadi preferensi konsumen adalah kecenderungan seseorang dalam memilih pengguna barang tertentu untuk dapat dirasakan dan dapat dinikmati sehingga dapat mencapai kepuasan dari pemakai produk tersebut, dan akhirnya konsumen tersebut loyal terhadap merek tertentu dari pada bermacam- macam produk sejenis (Handoko, 2016).

Secara bebas perilaku politik adalah diartikan keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara dalam

manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur. Sikapsikap warga negara, respon dalam menilai terhadap obyek dan peristiwa politik maupun aktifitasnya terhadap sistem politik yang ada saat ini sangat dipengaruhi pula oleh preferensi perilaku elite politik yang memerintah maupun kehidupan sosial budaya masyarakat (Pratiwi, 2017).

Dalam studi perilaku pemilih terdapat 3 pendekatan atau faktor dalam menentukan preferensi politik seseorang yaitu ada sosiologis, psikologis dan rasionalis, telah diciptakan Paul F. Lazarsfeld, dalam (Yustiningrum, 2015) salah satu yang paling mendasar adalah pendekatan sosiologis yang dimana asumsi dasar yang dari pendekatan ini adalah manusia sebagai makhluk sosial dan terikat pada lingkungan sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Perilaku pemilih cenderung mengikuti predisposisi politik lingkungan sosial dimana berada, dan ada beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi pilihan tersebut seperti status sosial- ekonomi, agama, pendidikan, tempat tinggal, ras, etnik, pekerjaan, jenis kelamin dan usia. Kemudian pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan melihat keadaan jiwa-jiwa pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan preferensi politik. Dan yang terakhir ialah

pendekatan rasional adalah pendekatan yang memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang suatu perbuatan yang berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyadaran, penanaman dan pengembangan sikap dan pengetahuan tentang politik, keluarga membantu tumbuh kembang anak, bagaimana pola asuh orang tua tersebut yang dapat membentuk sikap, perilaku, dan pola pikirnya, bagaimana kebiasaan yang setiap hari dilakukan hingga menjadi contoh bagi anak dan akhirnya kebiasaan tersebut disepakati menjadi nilai-nilai yang ada dilingkungan keluarga. Keluarga merupakan Institusi terkecil dalam masyarakat, seberapa dekat dan percayanya sebuah keluarga tersebut dalam membuat kesepakatan bersama.

Perilaku Politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi sosial politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik. Dimaksud dengan perilaku politik adalah (Handoko, 2016):

1. Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin wakil rakyat.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM.

3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak menjadi calon pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku.

Perilaku Politik dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan proses politik. Kegiatan ini meliputi antara lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok dan individu-individu di dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Kegiatan yang dilakukan itu pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian yakni fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Namun fungsi pemerintahan, maupun fungsi politik, biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik masyarakat.

2. Konsep Partisipasi dan Pendidikan Politik

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Khairudin, 2019).

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah lokal melihat partisipasi sebagai hal yang perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, seperti sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka; pekerja masyarakat melihatnya sebagai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi (Tesoriero, 2008).

Partisipasi memang merupakan konsep yang problematis. Sejarah proyek- proyek partisipasi masyarakat memang penuh dengan lubang-lubang contoh tokenisme, dan rakyat telah benar-benar belajar untuk melihat desakan berpartisipasi dengan sangat skeptis, karena kebanyakan orang memiliki pekerjaan lain yang lebih penting daripada menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan partisipasi simbolis (Sutrisno, 2017).

Partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain, memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya, Poerbakawatja dalam (Hadi, 2015).

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers dalam

(Tumbel, 2017) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi

kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik (Wardhani, 2018).

Sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas- aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan- tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat (Komara, 2015).

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut Huntington dan Nelson memberi batasan partisipasi politik pada beberapa hal. Pertama, Partisipasi politik yang menyangkut kegiatan- kegiatan dan bukan sikap-sikap. Kedua, subjek yang di masukan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara (*private citizen*) atau lebih tepatnya orang perorang. Ketiga, kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Keempat, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan (Huntington dan Nelson 1995: 6).

Preferensi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington 1997). Dari kerangka itu, maka dikembangkan peran-peran partisipasi politik ini dapat dikategorikan dalam lima bentuk sebagai berikut:

1. *Electoral Activity* adalah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pemilihan umum. Dalam identifikasi ini beberapa aktifitas partisipasi dapat berupa, mengikuti kampanye, memberikan sumbangan partai, menjadi sukarelawan dan tentu saja ikut serta dalam pemilihan umum.
2. *Lobbying* adalah kegiatan-kegiatan baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan menghubungi para pejabat pemerintahan dan politik. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan publik yang dibuat dapat berpihak terhadap kepentingan mereka atau kelompoknya.
3. *Organizational Activity* adalah keterlibatan masyarakat kedalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi inilah yang kemudian melakukan aktifitasaktifitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didesakkan dan menjadi agenda publik.
4. *Contacting* adalah aktifitas langsung warganegara dalam

menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan publik. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung, mengirim surat pembaca, menelepon pejabat, menandatangani petisi dan sebagainya yang tujuannya mempengaruhi kebijakan.

5. *Violence* adalah cara-cara yang menggunakan tekanan dan pemaksaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Cara-cara ini dapat dilihat dengan vandalisme, demonstrasi dan atau ancaman-ancaman yang ditujukan untuk melakukan perubahan secara langsung.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiarjo, 2010).

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Khairudin, 2019).

Preferensi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (Wardhani, 2018).

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah preferensi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Preferensi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Preferensi politik adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*), yang mempunyai

relevansi politik atau hanya memengaruhi pejabat-pemerintahan dalam pengambilan keputusan pemerintah (Subekti, 2014).

Selain itu dikatakan juga orang-orang yang tidak ikut serta dalam politik mendapat beberapa julukan diantaranya (Liando, 2016):

1. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidakpunya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
2. Sinisme diartikan sebagai kecurigan yang busuk dari manusia, dalam hal ini diamelihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. Alienasi, sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat serta kecenderungan berfikir mengenai pemerintahandan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
4. Anomie, sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu menalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan- tujuan dan hilangsa urgensi untuk bertindak.

Preferensi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Preferensi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh

pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan preferensi politik. menurut Huntington dan Nelson yang dalam (Wardhani, 2018) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh (Mas'oeed, 2011) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
2. Partisipasi politik nonkonvensional
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok

- e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Preferensi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Berhubungan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan. Dalam hal ini Kecakapan partisipatoris pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan umum sebagai berikut (Sartika, 2009):

1. *Interacting* (Interaksi) dalam pemilu menyangkut:
 - a. Mengkomunikasikan pemilu
 - b. Bekerjasama menyukseskan pemilu
 - c. Tanggap informasi akan pemilu
 - d. Posisi dalam sebuah tim pemenangan.
2. *Monitoring* (Pengawasan) dalam sebuah pemilu meliputi:
 - a. Mengawasi jalannya pemilu
 - b. Memantau isu pemilu
 - c. Menganalisis peserta pemilu
3. *Influencing* (Mempengaruhi) dalam sebuah pemilu melalui:
 - a. Memberikan suara
 - b. Menyuarakan pendapat dalam pemilu

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui

pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu. Intinya, pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakilwakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Berangkat dari teori di atas penulis menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. peran politik terkait erat dengan aktivitas- aktivitas politik, mulai dari peranan politikus professional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah suatu kegiatan keikutsertaan atau ambil bagian masyarakat maupun pemerintah dalam memilih pemimpin Negara dalam mencapai kebijakan- kebijakan yang ingin dicapai bersama.

3. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari system organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu di tingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, sehingga siswa di harapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing- masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak- hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Arfani menyatakan bahwa: “Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga Negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri.

Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga Negara kearah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi”.

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan soaial dengan *direct action* nya, dan sebagainya.

Definisi partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

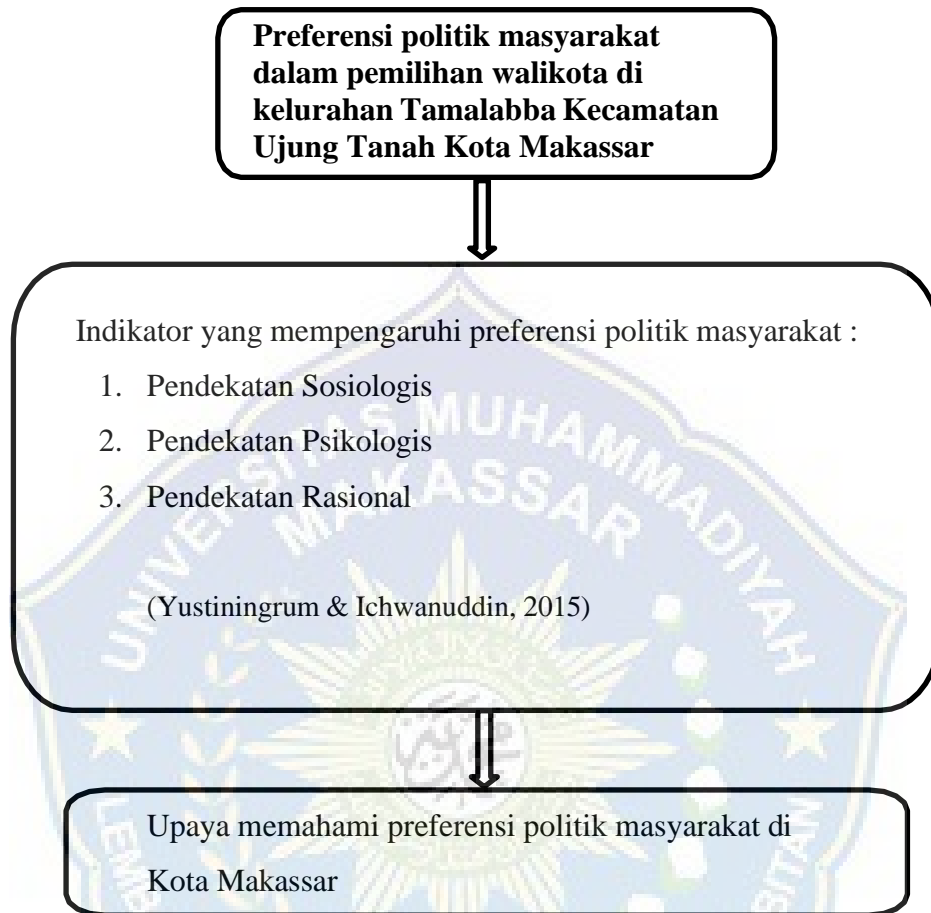
Kemudian menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti “Partisipasi Politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan”.

C. **Kerangka Pikir**

Preferensi politik masyarakat di Kelurahan Tanalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dapat ditinjau dari beberapa aspek berdasarkan indikator dari teori Lazarsfeld, dalam (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015) yang digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir maka yang menjadi fokus penelitian terkait dengan preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di kelurahan tamalabba. dapat diukur dengan pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah di tentukan maka yang menjadi gambaran dari penelitian terkait preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung tanah

Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat pada karakteristik sosial yang menjadi dasar suatu kelompok dalam melakukan suatu tindakan tertentu dalam pemilihan Walikota Makassar.
2. Pendekatan psikologis adalah menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama sikap dan sosialisasi, berdasarkan pendekatan ini masyarakat menentukan pilihan dikarenakan pengaruh psikologis yang kuat terhadap dirinya sebagai objek sosialisasi.
3. Pendekatan rasional adalah pendekatan yang diadopsi dari ilmu ekonomi, disini pemilih akan lebih mementingkan dirinya sendiri atau orang lain dan individu melihat akan timbulnya konsekuensi- konsekuensi yang ada dalam pilihan tersebut, lalu individu akan menentukan pilihan dari apa yang memberikan mereka keuntungan yang paling besar. Dalam penelitian ini, terkait pendekatan rasional, maka beberapa hal yang akan dianalisis adalah : (1) Memilih dikarenakan program- program/visi misi yang ditawarkan oleh kandidat; (2) Memilih dikarenakan kepribadian/figur dari kandidat yang mencalonkan; dan (3) Memilih kandidat dikarenakan kandidat tersebut memberikan keuntungan kepada individu (misalnya berupa uang atau menjanjikan suatu pembangunan kepada masyarakat).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan setelah seminar proposal di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar tentang preferensi politik masyarakat di wilayah tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiono (2012:9). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya pimpinan partai dan tim pemenangan yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok

permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar informan penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	D.merry bura	Lurah Kec. Ujung Tanah Tamalabba
2.	Siti Fatmawati	Kasi Pemerintahan Kec. Ujung Tanah Tamalabba
3.	Arif kushariadi	Warga Kec. Ujung Tanah Tamalabba
4.	Wahyudi saputra	Tokoh pemuda Kec. Ujung Tanah Tamalabba
5.	Aldi	Tokoh pemuda kec.ujung tanah tamalabba

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy:103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen :

1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya

berbeda- beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberitugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Tamalabba

Dikutip dari buku nama rupa bumi unsur buatan yang disusun Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, jumlah penduduk Kelurahan Tamalabba pada tahun 2019 tercatat 19.910 jiwa yang terdiri atas 9.788 jiwa laki-laki dan 10.122 jiwa perempuan.

Nama kelurahan Tamalabba diambil dari sebuah nama kampung yaitu Kampung Tamalabba yang artinya tidak asin. Kampung Tamalabba terletak dipesisir pantai. Namun disana terdapat sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh warga Ketika itu dan airnya tidak asin, sehingga disebutlah kampung tersebut sebagai kampung Tamalabba.

Kelurahan Tamalabba terdapat beberapa nama kampung yaitu :

1. Spongga yang artinya pagar kayu, kayu yang sangat kuat.
2. Tamalabba yang artinya tidak asin.

Posisi tempat sebelah utara berbatasan dengan laut selat Makassar, sebelah selatan berbatasan Kelurahan Malimongan Tua, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Totaka, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Tanah. Luas wilayah Kelurahan Tamalabba +0.58 KM.

VISI

Percepatan mewujudkan Kota Makassar sebagai Kota Dunia dengan ikunitas kuat untuk semua.

MISI

- 1) Revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi..
- 2) Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.
- 3) Sombere dan smart city untuk semua.

B. Hasil Penelitian

1. Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Preferensi politik pemilih sangat ditentukan oleh unsur-unsur pilihan baik yang rasional, tampak tidak rasional, detail penampilan, dan bahkan nada suara yang tampaknya remeh Kekuatan kontekstual yang meliputi persaingan elit, kemampuan bermusyawarah, mengemukakan pendapat dan mengkomunikasikan keahlian individu dalam suatu bidang ditampilkan sebagai atribut politisi untuk menarik keputusan pemilih.

Kota Makassar yang juga terlibat dalam perhelatan Pilkada 2020 yang melibatkan empat pasangan kandidat yaitu nomor urut 1 ada

Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi. Nomor urut 2 ditempati Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid. Lalu, nomor urut 3 terdapat pasangan Syamsu Rizal-Fadli Ananda. Sementara pasangan nomor urut 4 ada Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait preferensi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan walikota Makassar di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan indikator sosiologis, psikologis dan rasional akan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

2. Pendekatan Sosiologis

Menurut (Gaffar, 1992), pendekatan sosiologis, bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Masyarakat adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang.

Karena kondisinya masih labil dan mudah dipengaruhi oleh kalangan-kalangan partai politik. Masyarakat pada dasarnya hanya mengikuti suara terbanyak tanpa mengetahui identitas kandidat dan program-program yang ditawarkan pada saat kampanye.

Pilkada Kota Makassar tahun 2020 diakui oleh KPUD kebanyakan pemilih yang berpartisipasi pada pemilu cenderung hanya mengikuti pilihan politik dari keluarga dan orang tua, sehingga para kandidat cukup mudah dalam mendapatkan suara dari pemilih pemula.

“Pilihan politik masyarakat merupakan sasaran bagi para kandidat pada saat kampanye politik dalam perhelatan pilkada. Kalau di Tamalabba sendiri sendiri cenderung para pemilih tersebut menentukan pilihan karena mengikuti orang tua mereka. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan profil kandidat dan program yang ditawarkan sehingga di beberapa kesempatan pada saat sosialisasi kita selalu menyampaikan kepada para pemilih pemula agar benar-benar memperhatikan program-program kandidat yang mereka pilih. Tentu ini sebuah proses pendewasaan berpolitik bagi masyarakat.” (Wawancara dengan AS 5/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kebanyakan pemilih dalam menentukan sikap politik pada agenda pemilihan umum cenderung mengikuti pilihan dari lingkungan keluarga sehingga memudahkan para aktor politik yang terlibat dalam pilkada untuk mendapatkan dukungan dari segmen masyarakat umumnya.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa),

pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama (Surbakti, 1997).

Partisipasi politik bagi masyarakat biasanya berasal dari kalangan siswa SMU dan mahasiswa semester awal, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan umum, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih para wakil rakyatnya. Namun, para pemilih pemula harus menyadari bahwa kegiatan Pemilu menentukan masa depannya sertamasyarakat dan bangsanya.

Segmen pemilih pemula dalam keterlibatan pada perhelatan pilkada Kota Makassar tahun 2020 sangat menyadari pentingnya terlibat dalam menentukan kepala daerah sebagai pengatur roda pemerintahan satu periode kedepan. Hal tersebut mendorong mereka untuk ikut serta menyukseskan kegiatan pilkada. Kondisi pemilih pemula yang masih sangat labil dan mudah untuk dipengaruhi menjadikan mereka cenderung mengikuti pilihan dan suara terbanyak dari lingkungan pemilih berada.

“Harus kita akui memang kehadiran pemilih pemula dalam keterlibatannya pada kegiatan pilkada merupakan kesadaran pentingnya memilih pemimpin yang akan memimpin daerah kedepan. Hanya saja kecenderungan pemilih pemula dalam menentukan sikap politiknya itu mengikuti arus, jadi siapa kandidat yang banyak didukung oleh masyarakat maka mereka

juga akan mendukung kandidat tersebut, pada pemilih pemula ini hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mereka ketahui asal usul kandidat serta program-program yang ditawarkan.” (Wawancara dengan AJ 7/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat preferensi politik bagi masyarakat Kelurahan Tamalabba dalam menentukan pilihan terhadap kandidat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Masyarakat Kelurahan Tamalabba cenderung mengikuti suara terbanyak yang berada pada lingkungan memilihnya.

Menelaah perilaku masyarakat untuk dapat melihat partisipasi mereka tersebut dalam menentukan pilihannya yang ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Tindakan atau keputusan politik seorang pemilih ditentukan oleh perilaku, sikap dan persepsi politik. Tindakan tersebut berkaitan dan mempunyai kesamaan dengan partisipasinya dalam kehidupan politik, pemilih sebagai individu yang harus menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Karena itu, partisipasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dengan berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga dapat dijadikan indikator aktifitas politik dalam kegiatan pemilihan umum.

Sikap politik masyarakat di Kelurahan Tamalabba dalam memberikan hak suaranya pada pilkada tahun 2020 merupakan ajakan dari keluarga sekitar. Pemilih diberitahukan bahwa kandidat yang dipilih oleh keluarga merupakan orang Makassar asli dan memahami

permasalahan Kota Makassar. Informasi tersebut menjadikan para pemilih atau masyarakat ikut menentukan sikap dalam menentukan pilihan.

“Pada waktu itu saya ditanya sama om sudah memilih atau belum, jadi saya bilang sudah karena sudah berusia 17 tahun. Lalu disuruh ka pilih nomor 3 karena orang Makassar asli dan masih muda. Terus calon tersebut punya program beasiswa yang bisa dipake kalau mau lanjut kuliah. Makanya saya pilih mi.” (Wawancara dengan GW 9/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan perilaku politik pemilih dalam menentukan pilihan terhadap kandidat yang bertarung pada perhelatan Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pemilih pemula dari keluarga tentang kandidat yang harus mereka dukung. Walau pada dasarnya ajakan tersebut berbau politik sara’ karena membawa identitas kesukuan.

Karakteristik pemilih di Kelurahan Tamalabba Kecamatan ujung tanah Kota Makassar yang masih minim pengetahuan akan perpolitikan menyadikan para pemilih cenderung mengikuti suara dominan yang menjadi pilihan masyarakat diwilayahnya. Mudahnya pemilih atau masyarakat untuk diarahkan dalam menentukan sikap politik membuat para aktor sangat mudah dalam memobilisasi pemilih atau masyarakat.

“Itu pemilihan pertama yang ku ikuti, saat itu diajak ka sama tetangga untuk datang dan mendukung kandidat yang kampanye disana, dikasi ki bajukampanye, terus disuruh ki pilih itu kandidat. Kalau saya ikut-ikut ji ka karena semua orang disini rata-rata dukung itu kandidat.” (Wawancara dengan DG 9/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat atau pemilih dalam menentukan sikap politik sesuai dengan arahan dari masyarakat setempat, sehingga sikap pemilih tersebut cenderung mengarah kepada hubungan emosional yang terikat pada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan indikator sosiologis terkait preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar memberikan pengaruh bagi pemilih dalam menentukan sikap politik pada kegiatan pilkada. Mayoritas para pemilih di kalangan masyarakat menentukan pilihan sesuai dengan ajakan dari keluarga dan masyarakat sekitar tanpa mengetahui program serta visi misi kandidat yang didukungnya. Kondisi masyarakat yang masih labil dan belum memahami kegiatan politik menjadikan mereka hanya sekedar terlibat dan berpartisipasi pada kegiatan pilkada.

3. Pendekatan Psikologis

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis (Sastroatmodjo, 1995).

Preferensi politik didefinisikan sebagai penentuan pilihan dengan berbagai macam pertimbangan sesuai dengan nilai yang dibangunnya dalam menentukan standar penilaian terhadap seorang calon maupun partai politik. Perilaku pemilih dengan tipenya masing-masing ini yang kemudian akan menentukan preferensi politik seseorang. Dalam pendekatan psikologis para pemilih cenderung menentukan sikap berdasarkan identitas, visi misi dari kandidat.

Ketertarikan pemilih dalam ikut terlibat pada kegiatan seperti pilkada Kota Makassar tahun 2020 didasari pada identitas kandidat yang ikut mempengaruhi pilihan dari para pemilih. Ikatan emosional serta keterkaitan pemilih dengan kandidat membuat pemilih memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemilihan.

“Kalau terlibat dalam tim pemenangan sejauh ini saya belum melihat pemilih kita menjadi bagian dari struktur tim pemenangan dari kandidat. Sifatnya hanya sebagai relawan salah satu kandidat, itupun karena ada ikatan emosional yang terbangun antara kandidat dan para pemilih pemula. Katakanlah misalnya salah satu kandidat mensponsori kegiatan yang diadakan oleh kelompok remaja hal tersebut yang membuat pemilih pemula menentukan pilihan dan membuat identitas sebagai kelompok milineal. Itu yang banyak saya liat di Tamalabba pada pilkada tahun 2020.” (Wawancara dengan AS 5/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat hubungan yang terjalin antara kandidat atau partai terhadap pemilih pemula menjadi penentu pemilih pemula dalam mengarahkan dukungannya. Sehingga segmen pemilih pemula membentuk kelompok tersendiri yang mempertegas arah dukungan mereka terhadap kandidat.

Pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan

emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat (Alfian, 1990).

4. Pendekatan Rasional

Masyarakat merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Berbagai program dan visi misi kandidat menjadi bahan kampanye dalam proses pelaksanaan pemilihan walikota Makassar Tahun 2020. Mulai dari pemberian bantuan pendidikan, sarana dan prasarana olahraga sampai kepada pengembangan minat dan bakat pemuda menjadi materi kampanye kandidat. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap dukungan pemilih pemula dalam menentukan sikap politik.

“Pada dasarnya pemilih pemula kita itu masih sangat labil dan kurang memahami dinamika politik yang terjadi termasuk pada saat pelaksanaan pilkada. Hak pilih dari pemilih pemula didasarkan pada dukungan keluarga dan masyarakat sekitar pemilih berada. Namun memang ada beberapa pemilih pemula kita sudah cerdas dalam menentukan pilihan terhadap kandidat dengan melihat visi misi calon. Biasanya mereka ini merupakan pemilih pemula dari kalangan mahasiswa. Jadi sedikit banyaknya pengetahuan tentang politik mereka jauh lebih baik dari pada yang masih duduk di bangku SMA.” (Wawancara dengan AS 5/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan rasionalitas dari masyarakat dalam menentukan sikap politik pada pilkada Kota Makassar Tahun 2020 didasari dari tingkatan pendidikan dari pemilih . Pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi serta analisis pemilih pemula dalam memilih kandidat yang bertarung pada saat pemilihan kepala daerah.

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjustifikasi pilihan politiknya jika ditinjau dari studi *voting behaviors*. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Aktor politik berperan sangat penting dalam meningkatkan pendidikan politik bagi kelompok pemilih dalam menganalisis visi misi kandidat yang akan didukung sebagai kepala daerah di Kota Makassar.

Sehingga momentum pilkada tahun 2020 kandidat berupaya menerima masukan terkait kebutuhan pemuda serta memberikan pemaparan terkait program-program strategis kepada pemilih pemuda.

“Patut kita syukuri saya pikir bahwa pemikiran pemuda atau pemilih pemuda hari ini kebanyakan sudah sangat cerdas dalam menganalisis program-program kandidat, jadi mereka tidak lagi memilih karena arogansi kesukuan, kedaerahan dan agama. Dibeberapa kesempatan saya sendiri banyak bicara dengan para pemilih pemuda ini kenapa misalnya mendukung salah satu kandidat, mereka memaparkan bahwa program-program yang diusung merupakan kebutuhan masyarakat secara umum sertamampu menjawab kebutuhan dari pemilih pemuda yang mayoritas adalah pelajar. Ini tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi partai dan kandidat dalam memaparkan program mereka. Jadi semakin kandidat membuka wawasan pemilih pemuda saya pikir semakin besar kesempatan kandidat tersebut dapat mengarahkan pemilih dalam menentukan sikap politiknya.” (Wawancaradengan AZ 7/7/2023).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap kandidat yang bertarung dalam pilkada melalui analisis program yang ditawarkan kandidat. Hal tersebut merupakan sebuah tanda yang positif sebagai sebuah bentuk rasionalitas pemilih dalam menentukan sikap politiknya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Skripsi ini diawali dengan menganalisis data menggunakan triangulasi data. Sugiyono dalam teknik pengumpulan data, mengemukakan tentang triangulasi diartikan sebagai “teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.⁴ Selanjutnya, disampaikan pula bahwa bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Pada dasarnya analisis yang peneliti lakukan memakai Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Jadi, penelitian akan menguraikan satu-persatu analisis berdasarkan triangulasi data yaitu : Lurah, kasi pemerintahan, warga, tokoh pemuda dan aktivis. Triangulasi data ini menggunakan teknik non tes, teknik non tes yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosiologis, kondisi masyarakat yang masih labil serta minim pemahaman politik cenderung membuat sikap politik dan arah dukungan mereka mengikuti keluarga dan masyarakat di lingkungan pemilih berada.
2. Psikologis, kedekatan emosional dan citra kandidat terhadap masyarakat menjadikan masyarakat ikut serta sebagai relawan dalam mendukung kandidat melalui kegiatan kampanye dengan pendekatan media sosial serta kegiatan perlombaan.
3. Rasional, tingkat pendidikan masyarakat sebagai pemilih menjadi faktor penentu sikap dari masyarakat dalam menentukan sikap politik, dimana hanya beberapa pemilih pemula yang menentukan pilihan melalui analisis program serta profil kandidat yang diperoleh dari berbagai informasi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dari penelitian terkait preferensi politik masyarakat dalam pemilihan walikota di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yaitu:

1. Bagi KPPS Kelurahan Tamalabba lebih sering untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi pemilih cerdas yang dengan sadar menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pimpinan berkualitas demi perbaikan masa depan daerah.
2. Bagi partai politik dan kandidat senantiasa memberikan pemahaman politik serta mengedepankan tawaran program serta visi misi dibandingkan mengkampanyekan isu negative terhadap kandidat lain, apalagi sampai melakukan politik uang kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat sebagai pemilih perlu meningkatkan partisipasi tidak hanya sebagai pendukung salah satu calon namun perlu ikut mengawasi pelaksanaan pilkada serta tidak segan melaporkan jika ada tim, partai atau kandidat itu sendiri yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2010). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal MODERAT.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. Journal of Islamic Civilization. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i01.918>
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya.
- Hanafi, H.-S. (2011). Politik Indonesia. Politik Indonesia.
- Hasanuddin, H., Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>
- Herawati, R., Sukma, N. M., & Hananto, U. D. (2019). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Khairudin. (2019). Partisipasi Masyarakat. Psikologi Perkembangan.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. Jurnal Politico.
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.48-56>
- Kurnia, D., & Utami, S. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.
- Mas' oed, M. (2011). Perbandingan Sistem Politik. Gadjaja Mada University Press.

- Morrison. (2016). Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda. Visi Komunikasi.
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Strategi.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Nuryanti, S. (2016). Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. <https://doi.org/10.22146/jsp.10849>
- Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Prasetya, A. (2018). Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun. Pamator Journal.
- Pratiwi, N. V. (2017). Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Di Kecamatan Mowila. Wakapendik.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.
- Rajab, A. (2016). Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. Jurnal Hukum & Pembangunan. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.93>
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Crepido. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. Jurnal Penelitian Politik. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Sari, C.M.A. (2011) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku pemilih pada pemilu anggota dewan perwakilan rakyat kota banda Aceh tahun 2009. Medan: Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Sartika, R. (2009). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula :Studi Deskriptif Pada Siswa SMA Negeri di Kota Bandung. S2 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (studi Trun of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah KabupatenMagetan Tahun 2013). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.
- Sutrisno, Cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Tesoriero, J. I. & F. (2008). *Community Development*. Pustaka Pelajar.
- Tinov, M. T., & Handoko, T. (2016). Strategi Politik; Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu Di Aras Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855>
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*.
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*.
<https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Yustiningrum, Emilia, R., Ichwanuddin, & Wawan. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117–135.



LAMPIRAN

Lampiran 1

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara dengan narasumber di Kantor Kelurahan Tamalabba
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar**









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@punismuh.ac.id

Nomor : 1684/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Dzulqa'dah 1444 H

06 June 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0852/FSP/A.1-VIII/VI/1444 H/2023 M tanggal 6 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR FIRMAN CHAER**

No. Stambuk : **10564 1100518**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU WALIKOTA DI
KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Juni 2023 s/d 9 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

Lampiran 2

IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp: (0411) 441077 Fax: (0411) 448938
Website : <http://smap-nem.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 19277/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.	
Lampiran	: -	Walikota Makassar	
Perihal	: <u>izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1684/05/C.4-VIII/VI1444/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NUR FIRMAN CHAER
Nomor Pokok	: 105641100518
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU WALIKOTA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Juni s/d 14 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Juni 2023.

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **Drs. MUH SALEH, M.Si.**
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19680717-199112-1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Firman Chaer

Nim : 105641100518

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhikmah, S. Gum., M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Nur Firman Chaer

105641100518

by Tahap Tutup



Submission date: 13-May-2024 12:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377447675

File name: BAB_I_-_firman_-_hasil.docx (92.27K)

Word count: 2504

Character count: 16133

BAB I Nur Firman Chaer 105641100518

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	1%
3	jurnalaspikom.org Internet Source	1%
4	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%
5	Khairunnisa Khairunnisa, Sri Wahyuni Hasibuan, Syafriah Anjani. "Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Semester II Tentang Penggunaan Aplikasi Google Classroom Selama Perkuliahan Daring pada Masa Pandemi Covid-19", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%

7	journal.febi.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
9	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
10	adeptushispanustranscriptorum.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	banjarbaru.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.unimor.ac.id Internet Source	<1 %
13	liputan8.com Internet Source	<1 %
14	Kholifatul Khasanah. "Problematika Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak Difabel Selama Pandemi Covid-19 di SMALB ABC YKAB Pulisen Boyolali", Counselle Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB II Nur Firman Chaer

105641100518

by Tahap Tutup



Submission date: 13-May-2024 12:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377444664

File name: BAB_II_-_firman_-_hasil.docx (71.35K)

Word count: 3551

Character count: 24440

BAB II Nur Firman Chaer 105641100518

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	konsultasiskripsi.com Internet Source	3%
2	ridahelfridapasaribu.wordpress.com Internet Source	2%
3	journal.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
6	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
7	Dwi Irianti Handayani, Alexander Yaku, Yacob Bodang, Adelin Elsina Tanati, Sutiharni. "Preferensi bekicot Achatina fulica Bowitch., (Pulmonata : Achatinadea) terhadap beberapa jenis tanaman sebagai pakan di daerah Manokwari", Agrotek, 2019 Publication	1%

8	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1 %
9	fliphtml5.com Internet Source	1 %
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
13	Bhayu Rama, Ferry Setiawan. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA CITAMAN JERNIH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2021 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
16	www.coursehero.com	

Internet Source

<1 %

17 www.ranahriau.com
Internet Source

<1 %

18 brother-quiet.xyz
Internet Source

<1 %

19 lib.unnes.ac.id
Internet Source

<1 %

20 adoc.pub
Internet Source

<1 %

21 upeks.co.id
Internet Source

<1 %

22 umyiffahcollection.wordpress.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB III Nur Firman Chaer

105641100518

by Tahap Tutup



Submission date: 13-May-2024 12:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377445043

File name: BAB_III_-_firman_-_hasil.docx (31.61K)

Word count: 1010

Character count: 6926

BAB III Nur Firman Chaer 105641100518

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fdocumenti.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	3%
3	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Un

Do

Exclude matches



BAB IV Nur Firman Chaer

105641100518

by Tahap Tutup



Submission date: 13-May-2024 12:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377445923

File name: BAB_IV_-_firman_-_hasil.docx (38.45K)

Word count: 2296

Character count: 15451

BAB V Nur Firman Chaer

105641100518

by Tahap Tutup



Submission date: 13-May-2024 12:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377446347

File name: BAB_V_-_firman_-_hasil.docx (26.92K)

Word count: 230

Character count: 1539

BAB V Nur Firman Chaer 105641100518

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.scribd.com

Internet Source

4%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



NUR FIRMAN CHAER dilahirkan di Selayar tanggal **24 november 1999**

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2012 di SD Negeri Benteng 1 selayar . Kemudian pada tahun yang sama masuk ke SMP Negeri Benteng 1 Selayar dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 masuk di SMA Negeri 1 Benteng Selayar dan tamat pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program strata satu (S1). Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah dengan judul "Preferensi politik masyarakat dalam pemilihan walikota di kelurahan tamalabba kecamatan ujung tanah kota makassar".

